

Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter siswa sebagai warga negara muda

Retno Kurnia Saputri ^{a,1}, Aim Abdulkarim ^{b,2}, Leni Anggraeni ^{c,3}

^a Universitas Pendidikan Indonesia

¹ retnokurnia.s@upi.edu

ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan Indonesia yang memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter dan moral bangsa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), PKn diwajibkan pada semua jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan tujuan membentuk warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. PKn tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan kemampuan kritis, rasional, dan kreatif siswa dalam menghadapi isu-isu kewarganegaraan, serta mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, PKn mengajarkan nilai-nilai moral esensial yang mendukung demokrasi konstitusional melalui penguatan karakter privat dan publik. Implementasi penguatan pendidikan karakter melibatkan pendekatan berbasis kelas, budaya sekolah, dan peran orang tua. Dengan demikian, PKn berkontribusi signifikan dalam menciptakan warga negara muda mampu menumbuhkembangkan karakter yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa, karena mereka adalah generasi penerus yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

ABSTRACT

Civic Education is an important component in the Indonesian education system that has a central role in shaping the character and morals of the nation. In accordance with Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System (Sisdiknas), Civics Education is compulsory at all levels of education, from elementary school to university, with the aim of forming citizens who have a sense of nationality and love for the country. Civics not only focuses on the knowledge aspect, but also on developing students' critical, rational, and creative abilities in dealing with civic issues, as well as encouraging them to participate actively and responsibly in the life of society and the state. In addition, Civics teaches essential moral values that support constitutional democracy through strengthening private and public character. The implementation of strengthening character education involves classroom-based approaches, school culture and the role of parents. Thus, Civics contributes significantly in creating young citizens who are able to develop a strong character based on the nation's noble values, because they are the next generation who will lead Indonesia to a better future.

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3 dinyatakan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Sesuai dengan undang-undang tersebut, artinya pendidikan berfungsi untuk membentuk watak. Watak inilah yang kemudian disebut sebagai karakter (Perdana & Adha, 2020). Menurut Thomas Lickona (1991), sesuatu yang menjadi

Informasi Artikel

Diterima : 11 Desember 2024

Disetujui: 06 Mei 2025

Kata kunci:

Pendidikan Kewarganegaraan,
Karakter, Warga Negara Muda

Article's Information

Received: 11 December 2024

Accepted: 06 May 2025

Keywords:

Civic Education, Character, Young
Citizen

sebuah keputusan seorang individu atas karakter diri pribadi akan melalui proses yang disebut *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral acting*.

Dalam ilmu kewarganegaraan, karakter disebut dengan *civic disposition*. Tujuan utama dari *civic disposition* yaitu untuk menumbuhkan karakter atau watak warga negara, baik karakter privat maupun karakter publik. Karakter privat merujuk pada aspek-aspek pribadi dari seseorang yang muncul dalam lingkup pribadi kehidupannya. Di dalam lingkup ini, seseorang menunjukkan aspek-aspek yang lebih dalam dari kepribadian mereka, seperti integritas, kejujuran, dan empati dalam hubungan dengan orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan teman dekat. Selain itu, karakter privat juga mencakup bagaimana seseorang memperlakukan dan berinteraksi dengan orang-orang yang dekat secara emosional, serta konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip mereka dalam kehidupan sehari-hari. Karakter privat meliputi tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu.

Sedangkan karakter publik merupakan gambaran yang terbentuk dari interaksi seseorang dengan masyarakat secara luas. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tindakan dan prestasi mereka hingga cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Karakter publik seseorang dapat tercermin dalam kejujuran, integritas, dan sikap kerja keras yang mereka tunjukkan. Secara keseluruhan, karakter publik seseorang adalah gambaran yang kompleks dan dapat berubah seiring waktu berdasarkan interaksi dan tindakan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karakter publik meliputi kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, serta kemauan mendengar, bernegosiasi dan berkompromi. (Branson, 1998)

Karakter privat dan publik yang saling memiliki keterkaitan dalam pembentukan karakter peserta didik. Kedua karakter tersebut perlu diajarkan secara baik dan berimbang dalam Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah. Hal ini sangat penting dikembangkan karena watak kewarganegaraan merupakan dampak pembelajaran dan pengalaman seseorang, khususnya di sekolah. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Mata pelajaran ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai dasar yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, peserta didik diajak untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, mata pelajaran ini juga mendorong peserta didik untuk mengembangkan sikap kritis dan demokratis, yang sangat penting dalam era globalisasi saat ini. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga pada praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari dalam interaksi sosial mereka. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi beberapa aspek penting yang perlu dicapai, antara lain:

1. Membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa
3. Mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab (Murtiningsih et al., 2022)

Sebagai warga negara muda, siswa diharapkan dapat menumbuhkembangkan karakter yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa, karena mereka adalah generasi penerus yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, dengan tetap menjaga kerukunan,

kedamaian, dan toleransi dalam keberagaman. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan siswa dapat menjadi pilar utama dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa, serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan.

Metode

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penyusunan artikel ini adalah pendekatan kualitatif. Kemudian untuk metode yang dilakukan yaitu dengan metode studi literatur. Penulis mengumpulkan data dari rujukan artikel & jurnal yang tersedia di website terpercaya, sebagian besar berasal dari *Google Scholar*. Artikel yang dipilih adalah yang memiliki topik bahasan yang sejalan dengan tema yang diangkat dalam artikel ini. Penulis menghabiskan kurang lebih satu minggu untuk mengumpulkan informasi dari jurnal dan artikel, yang kemudian diubah menjadi informasi yang mudah dipahami dan berguna. Setelah itu, mereka menyusun dan merevisi artikel. Proses studi literatur terdiri dari membaca, menulis, dan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan tema artikel. Untuk meningkatkan poin baru, memberikan gambaran umum tentang tema-tema yang mendasari, dan merangkum pemikiran penulis.

Hasil dan Pembahasan

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang sangat penting dalam sistem pendidikan Indonesia. Sebagai pendidikan moral yang wajib, PKn diajarkan di setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 37, yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, serta mata kuliah wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi. Ketentuan ini menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jika kita mencermati pasal 37 dalam UU Sisdiknas tersebut, terlihat jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan memegang peranan sentral dalam membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik. PKn tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga berorientasi pada pengembangan kemampuan dan kompetensi peserta didik dalam berbagai tingkatan, termasuk intelektual, emosional, dan sosial. Secara rinci, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan kompetensi sebagai berikut. (Murtiningsih et al., 2022)

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Artinya, peserta didik diajarkan untuk tidak menerima informasi secara mentah-mentah, tetapi untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengkritisi setiap isu yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Mereka didorong untuk berpikir secara rasional dan kreatif dalam menemukan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi. Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dan negara. Peserta didik diajarkan untuk bertindak dengan tanggung jawab dan cerdas, serta mengembangkan sikap anti-korupsi sebagai bagian dari integritas pribadi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Pendidikan Kewarganegaraan membantu peserta didik mengembangkan diri secara positif dan demokratis, dengan mengedepankan nilai-

nilai yang menjadi karakter masyarakat Indonesia. Dengan demikian, mereka dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan bangsa-bangsa lain.

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Di era globalisasi ini, kemampuan berinteraksi dengan bangsa lain menjadi sangat penting. Pendidikan Kewarganegaraan memberikan bekal kepada peserta didik untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berinteraksi dengan komunitas internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai warga negara muda, siswa diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga mereka mampu menjadi warga negara muda yang berkarakter dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat menjadi pilar utama dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*), merupakan watak atau sifat – sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri. Karakter kewarganegaraan mencakup karakter privat (pribadi) dan karakter publik (kemasyarakatan) yang utama meliputi, 1) Menjadi anggota masyarakat yang independen (mandiri). Karakter ini merupakan kepatuhan secara suka rela terhadap peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab atas segala konsekuensi yang timbul dari perbuatannya serta menerima kewajiban moral dan legal dalam masyarakat demokratis; dan 2) Memenuhi tanggungjawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik.

Karakter privat meliputi tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu. Sedangkan karakter publik meliputi kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, serta kemauan mendengar, bernegosiasi dan berkompromi. Kedua karakter ini berguna dalam pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional, karena watak kewarganegaraan sangat penting dikembangkan sebagai dampak pembelajaran dan pengalaman seseorang saat berada di rumah, sekolah, komunitas dan organisasi-organisasi *civil society*. Oleh karena itu, penting sekali penguatan karakter privat dan publik dalam membangkitkan pemahaman berdemokrasi yang mensyaratkan adanya sikap tanggung jawab dari individu.

Penguatan karakter privat dan publik dapat dilakukan melalui pendidikan karakter atau biasa disingkat menjadi PPK dalam PKn adalah aktivitas pendidikan di sekolah yang bertujuan untuk memperkuat dan membina karakter siswa dengan cara penyalarsan pada olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) mengembangkan lima nilai utama sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental, yaitu Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong Royong, dan Integritas. Menurut Panggabean (2021), terdapat basis konsep penerapan dan pengembangan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah sebagai berikut.

1. Penguatan Pendidikan Berbasis Kelas

Pengembangan penguatan pendidikan karakter berbasis kelas dapat dilaksanakan dengan mengkombinasikan nilai-nilai karakter pada saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar dalam kelas dengan susunan pembelajaran yang sama dengan kurikulum yang ada pada mata pelajaran, pengelolaan kelas, pemilihan metode pembelajaran yang menguatkan manajemen kelas yang telah disesuaikan dengan karakter peserta didik, mengarahkan dan mengevaluasi proses belajar mengajar sesuai kebutuhan dari lembaga pendidikan tersebut. Penerapan penguatan pendidikan karakter

berbasis kelas, guru adalah penyedia bahkan penyemangat dalam membentuk nilai-nilai karakter yang ada pada diri peserta didik.

2. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya

Sekolah Penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah yaitu menyesuaikan dengan kebiasaan dan karakter sekolah. Aktivitas pembentukan karakter disusun serta diimplementasikan sesuai dengan budaya yang ada pada masing-masing sekolah.

3. Pendidikan Karakter Wali Murid

Orang tua merupakan lingkungan utama dalam pengembangan diri setiap anak. Karena orang tua memanglah pendidik utama dalam membentuk karakter anak dimana hal itu berupa rasa nyaman yang didapatkan anak karena orang tua yang harmonis, rumah yang bersih dan rapih, serta pemberian contoh yang baik sebagai teladan anak, hal ini yang mendukung perkembangan diri yang menjadi acuan bagi anak dalam perkembangannya.

Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan pembentukan karakter, sehingga memiliki tanggung jawab yang besar dalam mencapai tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai fondasi yang memungkinkan siswa memahami berbagai aturan, nilai-nilai, sistem, peranan, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kemasyarakatan serta kenegaraan. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan juga berperan dalam membekali siswa dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Meskipun pembentukan karakter bukanlah tanggung jawab eksklusif Pendidikan Kewarganegaraan, penting untuk diakui bahwa mata pelajaran ini memiliki peran yang signifikan karena mengajarkan nilai-nilai moral yang esensial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan teoretis, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral bangsa, yang pada akhirnya berkontribusi pada tercapainya masyarakat yang beradab dan berkarakter. (Humaeroh & Dewi, 2021)

Simpulan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang sangat penting dalam sistem pendidikan Indonesia, yang memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan moral bangsa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 37, PKn diwajibkan pada semua jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan warga negara yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PKn tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan kritis, rasional, dan kreatif siswa dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan, serta mendorong mereka untuk bertindak secara cerdas dan anti-korupsi. Selain itu, PKn juga membantu siswa mengembangkan diri secara positif dan demokratis sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia, serta mempersiapkan mereka untuk berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan global dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pendidikan Kewarganegaraan juga mengajarkan karakter privat dan publik yang esensial untuk mendukung demokrasi konstitusional, termasuk tanggung jawab moral, disiplin diri, dan kepedulian sebagai warga negara. Melalui penguatan pendidikan karakter yang melibatkan kelas, budaya sekolah, dan peran orang tua, PKn berupaya membentuk siswa yang berkarakter, berintegritas, dan mampu menjadi pilar utama dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dengan demikian, PKn berkontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang beradab dan berkarakter, sejalan dengan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Referensi

- Branson, M. S. (1998). *The Role of Civic Education*. Center For Civic Education.
- Humaeroh, S., & Dewi, D. A. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi Dalam Pembentukan Karakter Siswa. *Journal on Education*, 3(3), 216–222. <https://doi.org/10.31004/joe.v3i3.381>
- Murtiningsih, I., Fatimah, S., Harsan, T., & Prasetya, A. (2022). Kendala Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menumbuhkan Civic Disposition Peserta Didik Di Masa Pandemi. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 9(2), 141–147. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.17606>
- Panggabean, S. (2021). *Konsep Dan Strategi Pembelajaran*. Yayasan Kita Menulis.
- Perdana, D. R., & Adha, M. M. (2020). Implementasi Blended Learning untuk Penguatan Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2). <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/citizenship.v8i2.6168>
- Thomas Lickona. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.